Hubungan antara Total Aset dan Aset Tetap dengan Pendapatan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Provinsi Sulawesi Tengah

Bahran Tahawa
BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah
E-mail: bahran65@gmail.com

Article History:
Received: 01 Mei 2024
Revised: 13 Mei 2024
Accepted: 15 Mei 2024

Keywords: *Total Aset, Total Aset Tetap, Pendapatan*

Abstract: *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Total Aset dan Aset Tetap terhadap Pendapatan OPD Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan Sampel berasal dari data aset dan asset tetap pada Neraca 40 OPD di Provinsis Sulawesi tengah tahun 2022 sampai tahun 2023. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara Total Aset dengan dengan pendapatan OPD. Sedangkan total asset Tetap berpengaruh positif erhadap pendapatan OPD .*

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah dari perspektif aset mengacu pada bagaimana aset-aset yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi atau menjadi sumber pendapatan untuk daerah tersebut (Tukunang, 2016). Pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan melalui investasi pada aset-aset seperti properti komersial, portofolio investasi, atau saham perusahaan. Pendapatan ini dapat diperoleh melalui dividen, bunga, atau keuntungan modal dari penjualan asset (Oktavia and Handayani, 2021). Jika pemerintah daerah memiliki aset yang dapat disewakan, seperti gedung-gedung atau tanah, maka pendapatan dapat diperoleh dari biaya sewa yang dibayarkan oleh penyewa (Wibowo, 2022).

Aset-aset berupa sumber daya alam seperti tambang, hutan, atau tanah pertanian dapat memberikan pendapatan melalui royalti atau penerimaan dari aktivitas ekstraksi atau penggunaan sumber daya tersebut. Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari penjualan aset yang tidak lagi dibutuhkan atau yang dianggap tidak efisien untuk dikelola.

Pendapatan pemerintah dapat bertambah dari adanya dari Pajak Properti. Nilai aset properti yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi pendapatan daerah melalui pajak properti. Jika nilai aset properti meningkat, pendapatan dari pajak properti juga dapat meningkat (Utiarahman, 2016). Pengelolaan yang efisien atas aset-aset daerah dapat meningkatkan nilai aset itu sendiri. Misalnya, revitalisasi kawasan perkotaan atau pengembangan infrastruktur dapat meningkatkan nilai properti, sehingga berdampak pada pendapatan daerah dari pajak properti.

Keterkaitan antara asset dan pendapatan daerah adalah sangat penting dalam konteks keuangan dan pembangunan daerah (Azhar, 2017). Aset daerah mencakup properti, investasi, sumber daya alam, infrastruktur, dan aset lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah

daerah (YOSINTA, 2018). Pendapatan daerah, di sisi lain, merujuk pada sumber-sumber penerimaan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran operasional, pembangunan, dan pelayanan public (Setiabudhi, 2019). Berikut adalah beberapa keterkaitan yang penting antara aset dan pendapatan daerah:

1) Pendapatan dari Penyewaan Aset: Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti gedung-gedung atau lahan, dapat disewakan kepada pihak swasta atau organisasi lain. Pendapatan dari penyewaan ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah.
2) Pendapatan dari Investasi Aset: Pemerintah daerah dapat menginvestasikan asetnya dalam bentuk portofolio keuangan atau investasi lainnya. Pendapatan dari investasi ini, seperti bunga, dividen, atau keuntungan modal, dapat meningkatkan pendapatan daerah.
3) Pendapatan dari Pajak Properti: Nilai aset properti yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat menentukan pendapatan dari pajak properti. Jika nilai aset properti meningkat, pendapatan dari pajak properti juga akan meningkat.
4) Pendapatan dari Penjualan Aset: Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari penjualan aset yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak efisien untuk dikelola. Pendapatan ini dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan atau operasional pemerintah daerah.
5) Pendapatan dari Pengelolaan Sumber Daya Alam: Jika pemerintah daerah memiliki aset berupa sumber daya alam seperti tambang atau hutan, pendapatan dapat diperoleh dari royalti atau penerimaan lainnya dari aktivitas ekstraksi atau penggunaan sumber daya tersebut.

Total aset (total assets) adalah jumlah keseluruhan dari semua aset yang dimiliki oleh suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Aset adalah segala hal yang dimiliki oleh entitas dan memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat di masa depan. Total aset mencakup berbagai jenis aset, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar. Beberapa contoh aset yang termasuk dalam total aset adalah: Aset lancar (current assets): seperti kas, piutang dagang, persediaan, dan investasi jangka pendek. Aset tidak lancar (non-current assets): seperti properti, peralatan, kendaraan, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Jadi, total aset mencakup semua jenis aset yang dimiliki oleh entitas, termasuk aset lancar dan tidak lancar.

Sedangkan Aset tetap menurut SAP (standar akuntansi pemerintah) adalah bagian dari total aset yang meliputi aset yang dimiliki oleh suatu entitas untuk digunakan dalam operasi dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun (Lauma, Morasa and Kalangi, 2016). Aset tetap juga dikenal sebagai aset jangka panjang atau aset tidak lancar. Aset tetap memiliki umur manfaat yang lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam aktivitas operasional normal entitas. Pengeluaran untuk aset tetap umumnya diakui sebagai investasi yang akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang kepada entitas.

Perbedaan utama antara total aset dan aset tetap adalah Total aset mencakup semua jenis aset yang dimiliki oleh entitas, termasuk aset lancar dan tidak lancar. Sedangkan aset tetap hanya merupakan bagian dari total aset yang mencakup aset yang digunakan dalam operasi jangka panjang. Tujuan: Total aset mencerminkan nilai keseluruhan dari sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas. Sedangkan aset tetap memberikan gambaran tentang investasi jangka panjang yang dilakukan oleh entitas untuk mendukung operasionalnya. Oleh karena itu asset dan asset tetap sangat berpengaruh pada pendapatan suatu entitas. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul "Hubungan antara Total Aset dan Aset Tetap dengan Pendapatan OPD Provinsi Sulawesi Tengah"

LANDASAN TEORI

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) (Korry, 2018). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan) (Elsye, 2013)

Akuntansi Aset

Definisi aset dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah untuk dipergunakan oleh instansi pemerintahan itu sendiri serta digunakan untuk masyarakat luas (Fitriyah, Wiyono and Ifa, 2018)

Akuntansi Aset Tetap

Definisi aset tetap dalam Pernyataan Standar AkuntansiPemerintahan Berbasis Akrual (PSAP BA) No. 7 Paragraf 4 PP No. 71 Tahun 2010 adalah: Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum(Niu, Karamoy and Tangkuman, 2014) (Engka, Tinangon and Wokas, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan total aset dan aset tetap sebagai variabel independen dan pendapatan OPD sebagai variable dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data aset tetap, persediaan dan pendapatan daerah pada Neraca di 40 OPD di Provinsis Sulawesi tengah tahun 2022 sampai tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters[a,b]	Mean	.00
	Std. Deviation	2.79841630
Most Extreme Differences	Absolute	.039
	Positive	.039
	Negative	-.028
Kolmogorov-Smirnov Z		.562
Asymp. Sig. (2-tailed)		.123

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber Data: SPSS 2024

Berdasarkan hasil pengelolaan analitis statistik uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa jumlah data yang diolah sebanyak 44 unit.

Sedangkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,123. Hasil nilai signifikansi data sebesar 0,123 > 0,05 (Ghozali, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

Tabel 2. Uji Auto Korelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.930[a]	.865	.858	2.86586E+11	.865	131.050	2	41	.000	2.005

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber Data: SPSS 2024

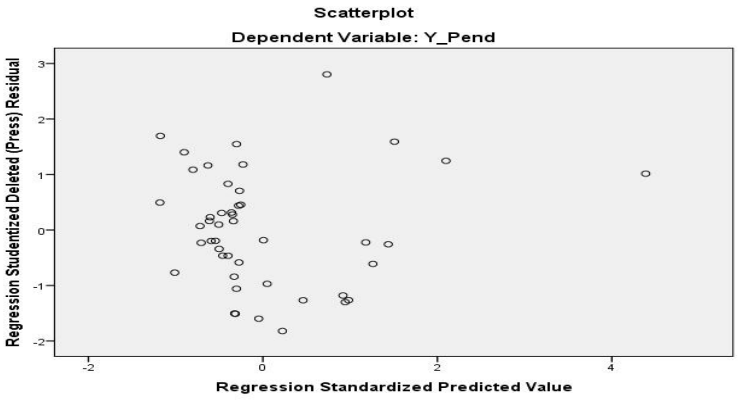
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai d sebesar 2,005. Nilai dU dan dL dapat dilihat dari tabel DW yaitu dengan melihat jumlah sampel (N) = 44 dan jumlah variabel independen (k) = 3. Dilihat dai tabel tersebut diperoleh dL = 1,37 dan dU = 1.66, maka nilai 4-DL sebesar 2,674 dan 4-DU sebesar 2,63(Ghozali, 2016). Jika nilai d (durbin watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.279	3.579
.279	3.579

Sumber Data: SPSS 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (Ghozali, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Sumber Data: SPSS 2024

Berdasarkan gambar hasil uji heteroskedasitas diatas dapat diketahui bahwa titik- titik menyebar secara acak dibawah dan diatas atau disekitar angka 0 (Ghozali, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedasitas pada model regresi ini.

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.067	5.198		1.360	.181
	X1	-2.848	.192	-1.610	-14.816	.000
	X2	2.660	.166	1.741	16.026	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber Data: SPSS 2024

Rumus persamaan regresi linier berganda berdasarkan tabel diatas sebagai berikut :

Y = 7.067 – 2,848 X1 + 2,660 X2 + e

Pada penelitian ini t tabel dapat diketahi dengan cara melihat taraf signifikan 0,05 dengan degree of freedom (df) = N (jumlah sampel) – K (jumlah variabel)

= 44 – 3 = 43. Sehingga diperoleh ttabel sebesar 1.68288

Pengaruh Total Aset Terhadap Pendapatan OPD

Nilai thitung intensitas aset tetap sebesar 14,816. Nilai - t hitung > -t tabel dan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima, artinya total aset berpengaruh terhadap pendapatan OPD. hasil ini sejalan dengan penelitian (Kusen, 2015) yang dimana Hubungan antara aset dan pendapatan daerah sangat penting dalam konteks keuangan pemerintah. Aset daerah, seperti yang telah disebutkan di atas, mencakup semua kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk properti, infrastruktur, investasi keuangan, dan lainnya. Pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan langsung dari asetnya dengan cara menyewakan properti atau infrastruktur kepada pihak swasta atau publik. Contoh-contoh ini termasuk sewa kantor, toko, atau fasilitas lainnya, serta pengelolaan aset seperti lapangan parkir atau pusat perbelanjaan.

Pengaruh Total Aset Tetap Terhadap Pendapatan OPD

Nilai thitung intensitas aset tetap sebesar 16.026. Nilai -thitung > -ttabel dan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima, artinya total asset tetap berpengaruh terhadap pendapatan OPD. hasil ini sejalan dengan penelitian (Wicaksana, Harmono and Yuniarti, 2021) yang dimana Aset tetap pemerintah daerah dapat menjadi sumber pendapatan melalui penggunaannya. Contoh penggunaan aset tetap yang menghasilkan pendapatan meliputi: Penyewaan properti pemerintah untuk tujuan komersial seperti kantor, toko, atau fasilitas lainnya, Pemberian izin atau sewa atas penggunaan lahan atau fasilitas untuk kegiatan komersial atau acara tertentu dan Biaya penggunaan infrastruktur seperti jalan tol atau transportasi umum yang menghasilkan pendapatan.

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.930[a]	.865	.858

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Sumber Data: SPSS 2024

Berdasarkan hasil pengelolaan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,865 atau 86.5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian, secara bersamaan dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 86.5% dan sisanya 14.5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa total asset tetap sebagai variabel independen pertama berpengaruh negative terhadap pendapatan OPD hal ini di dukung oleh informasi stastistika dimana Nilai - t hitung > -t tabel dan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Total asset tetap sebagai variabel independen kedua berpengaruh terhadap pendapatan OPD yang sejalan dengan statistika dimana Nilai thitung intensitas aset tetap sebesar 16.026. Nilai -thitung > -ttabel dan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan hanya data pada skala OPD mungkin lebih efektif melihat dari entitas kabupaten/kota ataupun provinsi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan tambahan variabel yang dapat mempengaruhi asset lancar seperti persediaan dan beban di bayar dimuka dan menambah jumlah indikator pengukuran agar dapat lebih mewakili populasi di Provinsi Sulawesi Tengah**.**

DAFTAR REFERENSI

Azhar, I. (2017) ‘Pengaruh kualitas aparatur daerah dan regulasi terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh’, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, 1(1), pp. 49–61.

Elsye, R. (2013) ‘Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung’, *Otonomi Keuangan Daerah*. Program Studi Keuangan Daerah, 1(1), pp. 18–40.

Engka, F. K., Tinangon, J. J. and Wokas, H. R. N. (2017) ‘Analisis Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara’, *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

Fitriyah, Z. L., Wiyono, M. W. and Ifa, K. (2018) ‘Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang’, *Counting: Journal of Accounting*, 1(2), pp. 54–62.

Ghozali, I. (2016) ‘Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23’. Univ. Diponegoro Press.

Korry, I. N. S. (2018) ‘Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras’, *Kertha Wicaksana*, 12(1), pp. 76–79.

Kusen, G. J. (2015) 'Prinsip-Prinsip Hukum Pengelolaan Aset Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara)', *Lex et Societatis*, 3(2).

Lauma, E. B., Morasa, J. and Kalangi, L. (2016) 'Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow', *ACCOUNTABILITY*, 5(2), pp. 84–97.

Niu, F. A. L., Karamoy, H. and Tangkuman, S. (2014) 'Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4).

Oktavia, C. and Handayani, N. (2021) 'Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).

Setiabudhi, D. O. (2019) 'Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance', *The Studies of Social Sciences*, 1(1), pp. 7–21.

Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tukunang, S. C. F. (2016) 'Manajemen aset daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2).

Utiarahman, N. R. (2016) 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).

Wibowo, N. (2022) 'Penyusutan Aset Tetap Yang Diterapkan Pada Aplikasi Simda Bmd Di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (Bpkpad) Kabupaten Purworejo'. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Wicaksana, A., Harmono, H. and Yuniarti, S. (2021) 'Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Malang', *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Merdeka Malang, 6(1), pp. 1–14.

YOSINTA, K. N. (2018) 'Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga'. Faculty of Social and Political Sciences.